

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PENGELOLAAN ARSIP STATIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

R.Stevanus Bayu Mangkurat¹, Ferry Andrian Dwikukuh²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

Email : bayumangkurat@iwu.ac.id¹, ferryandrian.21023140@iwu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya kebijakan digitalisasi pengelolaan arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, yang tercermin dari keterbatasan sarana dan prasarana serta alur akses arsip digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data primer diperoleh dari 9 informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara, serta triangulasi data. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, terdiri enam aspek, diketahui empat aspek berjalan optimal, sedangkan dua aspek masih mengalami kendala. Hambatan utama meliputi kekurangan tenaga ahli TI, keterbatasan anggaran untuk sarana dan peralatan seperti scanner dan server, rendahnya pemanfaatan layanan arsip digital oleh masyarakat, serta gangguan server pusat. Upaya yang disarankan antara lain menjalin kerja sama dengan institusi luar dan pendidikan bidang TI, meningkatkan komitmen pegawai, memperbaiki sarana dan prasarana, mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan pemeliharaan server secara berkelanjutan guna mendukung implementasi kebijakan digitalisasi arsip statis yang lebih efektif.

Kata Kunci : Pengelolaan Arsip, Arsip Statis, Kebijakan Digitalisasi, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Arsip Digital.

ABSTRACT

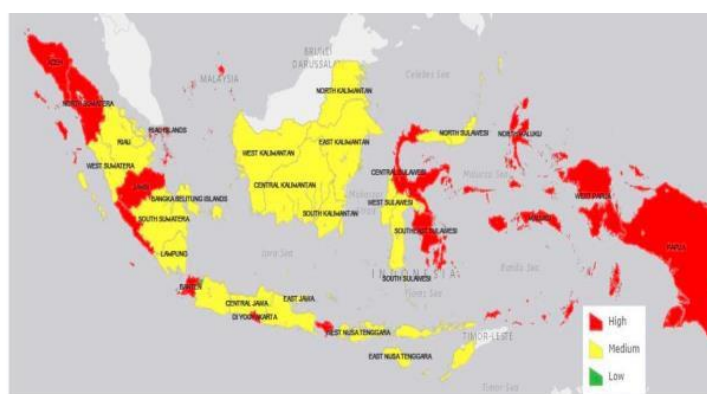
This study is motivated by the suboptimal implementation of the policy on digitizing static archives management at the Library and Archives Service of West Java Province, as reflected in the limited infrastructure and digital archive access procedures. The research method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach. Primary data were obtained from 9 informants, while secondary data were sourced from relevant documentation. Data collection techniques included literature review, field observation, interviews, and data triangulation. Data analysis was conducted through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. Based on the research results using Grindle's policy implementation theory, which consists of six aspects, four aspects have been running optimally, while two aspects still face challenges. The main obstacles include a shortage of IT experts, budget limitations for infrastructure and equipment such as scanners and servers, low public utilization of digital archive services, and server disruptions from the central system. Recommended efforts to overcome these challenges include establishing cooperation with external institutions and educational entities in IT, enhancing staff commitment, upgrading infrastructure and facilities, optimizing socialization to the public, and ensuring continuous server maintenance to support the more effective implementation of the static archive digitization policy.

Keywords: Archive Management, Static Archives, Digitization Policy, Policy Implementation, Digital Archive Services.

PENDAHULUAN

Digitalisasi arsip merujuk kepada proses pelaksanaan mengkonversi dokumen fisik menjadi bentuk format digital, yang dapat memudahkan akses dan efisiensi terhadap informasi. Efisiensi dalam pengelolaan informasi dapat meningkatkan digitalisasi arsip guna mendukung transparansi dan akuntabilitas (Marshall, 2018) betapa pentingnya keberadaan sistem informasi kearsipan yang efisien guna menunjang pengelolaan arsip yang lebih optimal. (Sudarsana *et al.*, 2024) Selain itu, menurut (Shobarudin *et.al.* 2024) menyatakan bahwa akses informasi Arsip yang mudah dan cepat dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengambilan keputusan (Janah *et al.*, 2024).

Gambar 1



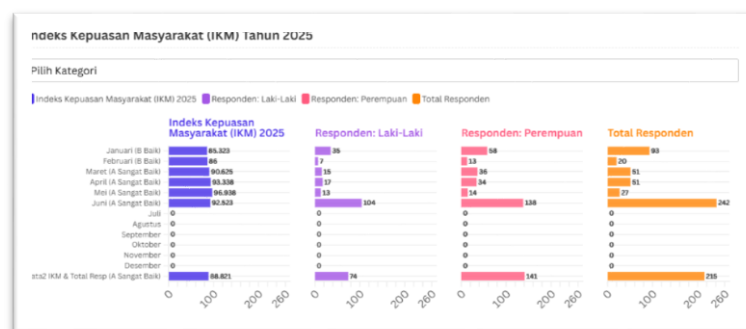
Sumber : Wilantika *et al* 2018

Kesenjangan Digital di Indonesia berdasarkan provinsi masih belum merata. Hal ini seharusnya disesuaikan dengan standar program percepatan digital di Indonesia mulai menunjukkan penguatan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah digitalisasi pengelolaan informasi, termasuk di dalamnya pengelolaan arsip. Namun, isu yang sebenarnya lebih mendasar terkait arsip digital adalah keberlanjutan informasi itu sendiri (Bawono, 2020). Isu ini sering kali kurang mendapat perhatian publik. Keberlanjutan informasi menjadi sangat penting, mengingat kerentanannya dalam bentuk digital. artinya, informasi digital harus tetap dapat diakses dan digunakan seiring berjalannya waktu, meskipun teknologi yang digunakan untuk menyimpannya terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh tingginya kesenjangan digital (Ariansyah *et al* 2019). Meskipun demikian, kesenjangan digital yang terukur lebih banyak terlihat dalam aspek akses digital, dan belum sepenuhnya mencakup kesenjangan dalam kemampuan digital maupun hasil yang dicapai dari penggunaan teknologi digital (Wilantika *et al* 2018) Meski begitu, kondisi ini sudah cukup untuk menggambarkan betapa besar tantangan kesenjangan digital di Indonesia

Kebijakan Digitalisasi Pengelolaan Arsip Statis di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai dasar hukum utama, kemudian Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kearsipan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang digitalisasi arsip, termasuk alih media dan preservasi arsip statis. Serta terakhir kebijakan lokal yaitu Perda Provinsi Jabar No 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pergub Jabar no 101 Tahun 2022 tentang pengelolaan arsip statis Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip, memudahkan akses informasi publik, dan mendukung dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

Gambar 2



Sumber : Anri.go.id

Layanan SIKN dan JIKN Tahun 2025 diperoleh Responden laki – laki dan perempuan yang sering mengakses layanan aplikasi SIKN dan JIKN guna mencari arsip dari Bulan Januari sampai Bulan Juni terhitung total 215 responden dengan rata - rata IKM sebesar 88.821 persen. Berdasarkan data tersebut Jumlah tersebut sudah termasuk pencapaian sangat puas dalam kurun waktu enam bulan. Namun implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi.

FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan Pendahuluan di atas, maka fokus penelitian ini adalah aspek- aspek implementasi kebijakan digitalisasi arsip statis Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi

1. Struktur Institusional, mengevaluasi kejelasan SOP (Standar Operasional prosedur) dan kesesuaian struktur Institusional dengan kebutuhan teknis digitalisasi.
2. Dinamika Kekuasaan, mengidentifikasi bagaimana kepentingan, pengaruh, dan strategi aktor mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya
3. Kapasitas pelaksanaan yang mencakup evaluasi terhadap sumber daya yang dimiliki DISPUSIPDA meliputi sumber daya manusia, infrastuktur teknologi, dan anggaran.

4. Partisipasi masyarakat mengevaluasi program sosialisasi atau edukasi yang dilakukan DISPUSIPDA untuk meningkatkan partisipasi publik.
5. Adaptasi dan Inovasi mengukur sejauh mana penerapan teknologi, peningkatan sistem keamanan data, dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan teknis.
6. Pemantauan dan evaluasi mengukur penggunaan hasil indikator kerja dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kebijakan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dan menjadi dasar peneliti menyusun identifikasi dan pembatasan masalah, maka fokus permasalahan dalam rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

7. Bagaimana implementasi kebijakan digitalisasi pengelolaan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ?
8. Apa hambatan implementasi kebijakan digitalisasi arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ?
9. Apa upaya yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan digitalisasi arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

10. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan digitalisasi arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
11. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan digitalisasi arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan digitalisasi arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Ilmu Politik

Ilmu Politik merupakan ilmu yang mengkaji hubungan kekuasaan yang meliputi interaksi antara warga negara dengan pemerintah, serta bagaimana kekuasaan tersebut dimanfaatkan dalam proses perumusan kebijakan publik. (Safrin Lamusrin 2025)

Definisi Digitalisasi Arsip

Digitalisasi Arsip merujuk pada proses Mengubah arsip fisik menjadi format digital untuk

memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaannya. Proses ini melibatkan lebih dari sekedar pemindaian dokumen, digitalisasi juga mencakup pengolahan data digital, pengolahan metadata, serta penyimpanan arsip dalam sistem yang aman dan terorganisir (Deegan, 2002)

Di Indonesia, Digitalisasi arsip dilakukan untuk memastikan bahwa arsip yang bernilai sejarah, hukum, atau administratif tetap bisa diakses dengan aman meskipun bentuk fisiknya sudah rusak seiring waktu. Selain itu, digitalisasi memberikan kemudahan akses arsip kapan saja dan dari mana saja, serta mendukung transparansi dan efisiensi dalam layanan publik (Terralogiq 2023)

Tahapan dalam Digitalisasi arsip meliputi proses pengumpulan arsip, pemindaian dokumen menggunakan scanner, manipulasi data digital seperti pengolahan format, serta penyimpanan dan pengelolaan arsip dalam sistem elektronik yang aman dan terstandarisasi

Definisi Kebijakan Publik

Menurut (Gerston 2024), Kebijakan Publik tidak hanya sekedar keputusan akhir, tetapi merupakan sebuah proses yang meliputi identifikasi permasalahan, pengembangan alternatif solusi, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi untuk memastikan efektivitasnya

Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan merupakan serangkaian langkah yang disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan. Tujuannya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar efektif serta mampu menjawab persoalan yang ada (Anderson, 2015). Tahapan utama dalam proses ini mencakup perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perumusan Kebijakan

Pada tahap awal, fokus utama adalah mengidentifikasi masalah dan merancang berbagai alternatif solusi. Proses ini dilakukan melalui analisis yang mendalam serta melibatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan bersifat solutif, realistis, serta dapat diterima secara teknis, sosial, dan politik (Saputro & Sari, 2022).

2. Pengambilan Keputusan

Setelah berbagai alternatif kebijakan dianalisis, pihak yang berwenang akan menentukan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta dampak sosial maupun lingkungan. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan keputusan yang diambil pada tahap ini (Nugroho et al., 2023).

3. Pelaksanaan Kebijakan

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah kebijakan disetujui. Implementasi berjalan melalui

penyediaan sumber daya, penyusunan pedoman teknis, serta koordinasi antar lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan pada tahap ini adalah kemampuan lembaga dalam mengelola proses dan memanfaatkan teknologi secara optimal (Rahman & Putri, 2021).

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan indikator yang terukur untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Dari hasil evaluasi, dapat diidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu perbaikan, yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan revisi maupun penyempurnaan kebijakan ke depan (Wicaksono et al., 2022).

Implementasi Kebijakan Publik

Merilee S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah proses administratif yang bisa diamati secara lebih rinci pada level program tertentu. Pemikirannya ini dikenal dengan istilah “Implementation as Political and Administrative Process”, yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keputusan di atas kertas, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dijalankan dalam praktik.

Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, apakah proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak nyata, baik berupa perubahan pada individu maupun kelompok masyarakat, serta sejauh mana kebijakan diterima oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi juga memastikan adanya efek yang dirasakan oleh masyarakat.

Grindle menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Artinya, kualitas substansi kebijakan yang dirumuskan serta kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan di lingkungan pelaksanaannya akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik.

Model Implementasi Grindle

Model implementasi yang diperkenalkan oleh Barbara Grindle merupakan salah satu kerangka untuk melihat bagaimana kebijakan publik benar-benar dijalankan dalam praktik. Melalui model ini, kebijakan yang biasanya tampak abstrak dapat dipahami sebagai rangkaian langkah nyata yang bisa diamati di lapangan.

Secara garis besar, model ini menekankan beberapa tahapan penting. Pertama adalah perencanaan (*planning*), yaitu proses menyusun rencana pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah menentukan tujuan yang ingin dicapai, menghitung sumber daya yang dibutuhkan, serta merancang mekanisme pelaksanaannya. Tahap berikutnya adalah komunikasi (*communication*).

Komunikasi yang baik menjadi kunci agar seluruh pihak yang terlibat memahami arah dan tujuan kebijakan secara jelas. Informasi mengenai kebijakan harus tersampaikan, baik kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Dalam model implementasi Grindle, koordinasi menjadi aspek penting karena kebijakan publik umumnya melibatkan banyak lembaga dan unit pemerintah. Koordinasi yang efektif mencegah tumpang tindih dan memastikan proses berjalan lancar. Setelah itu, kebijakan dijalankan melalui implementasi formal, yakni penerapan resmi sesuai rencana, misalnya dengan membentuk program baru, mengalokasikan sumber daya, atau menjalankan regulasi. Namun, di samping itu terdapat juga implementasi informal, yang muncul dari cara pelaksana di tingkat lokal memahami dan menafsirkan kebijakan, sering kali dipengaruhi oleh norma atau praktik yang tidak tertulis. Proses implementasi kemudian diikuti dengan evaluasi, yang berfungsi menilai efektivitas kebijakan, capaian tujuan, serta dampaknya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi inilah dilakukan revisi dan penyesuaian, baik berupa perbaikan strategi, alokasi ulang sumber daya, maupun perubahan desain kebijakan agar lebih optimal.

Menurut Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan tidak sekadar dipahami sebagai proses teknis dalam menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi yang rutin. Lebih dari itu, implementasi juga berkaitan dengan persoalan konflik, pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Grindle menegaskan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tidak serta-merta dapat diimplementasikan dengan lancar, sebab keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat implementability dari program tersebut.

Dalam pandangan Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup berbagai aspek penting, seperti kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diberikan, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, mekanisme pelaksanaan program, serta ketersediaan sumber daya yang dilibatkan. Konteks implementasi kebijakan mencakup unsur kekuasaan, kepentingan, strategi para aktor, karakteristik lembaga serta penguasa, hingga tingkat kepatuhan dan responsivitas pihak yang terlibat. Tujuan kebijakan pada dasarnya diwujudkan melalui program maupun proyek yang telah dirancang dan dibiayai, di mana keberhasilan pelaksanaannya dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

Isi kebijakan meliputi: (1) kepentingan kelompok yang terdampak, (2) jenis manfaat yang diberikan, (3) tingkat perubahan yang diharapkan, (4) lokasi pengambilan keputusan, (5) mekanisme pelaksanaan program, serta (6) sumber daya yang digunakan. Sementara itu, konteks implementasi ditentukan oleh: (1) distribusi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, (2) karakteristik lembaga serta penguasa, dan (3) tingkat kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Dari kedua aspek tersebut, implementasi kebijakan menghasilkan dua bentuk capaian, yakni dampak terhadap masyarakat, individu, dan kelompok, serta perubahan sosial dan tingkat penerimaan masyarakat. Dengan demikian, Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan kombinasi antara faktor isi kebijakan dan konteks yang membentuk hasil akhir program.

Konten Implementasi

Konten implementasi mencerminkan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan serta bagaimana faktor kontekstual memengaruhi proses pelaksanaannya. Grindle menekankan pentingnya memahami realitas praktis dari implementasi kebijakan, termasuk berbagai faktor yang menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai. Melalui kerangka ini, Grindle memberikan perspektif menyeluruh mengenai realisasi kebijakan dalam praktik, dengan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi jalannya implementasi. Pemahaman atas konten implementasi membantu para pembuat kebijakan merumuskan strategi yang lebih efektif agar tujuan dapat tercapai dalam beragam situasi.

Adapun elemen penting dalam konten implementasi menurut Grindle meliputi:

1. Struktur institusional,
2. Dinamika kekuasaan,
3. Kapasitas pelaksanaan,
4. Partisipasi masyarakat,
5. Adaptasi dan inovasi, serta
6. Pemantauan dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah model penelitian kualitatif dengan kajian fenomenologis. Penelitian Kualitatif bertujuan menggali lebih dalam mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti. Subjek penelitian menggunakan Purposive Sampling berjumlah 9 orang terdiri dari pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat dan pencari arsip selaku masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan digitalisasi pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa barat, termasuk proses, prosedur, kendala, dan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan. Teknik Pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, serta keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan kembali hasil dari penelitian yang telah dideskripsikan di atas, peneliti mengkaji mengenai implementasi kebijakan digitalisasi pengelolaan arsip statis pada dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui dan meneliti tentang proses kebijakan digitalisasi arsip peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi Grindle. Terdapat 6 (enam) konten implementasi berdasarkan teori implementasi Grindle.

STRUKTUR INSTITUSIONAL

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyampaikan terkait struktur institusional yang berkaitan dengan kebijakan digitalisasi pengelolaan arsip statis pada dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi Jawa Barat telah terstruktur. Hal tersebut sudah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 64 Tahun 2016 yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi, serta Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas, terbagi menjadi enam bidang yang saling berkoordinasi dalam mendukung pengelolaan arsip statis dan dinamis secara digital. Selain itu, struktur ini sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

DINAMIKA KEKUASAAN

Dinamika Kekuasaan menyoroti bagaimana distribusi kekuasaan, hubungan antar pihak, serta pengambilan keputusan dapat memengaruhi jalannya digitalisasi pengelolaan arsip statis. melibatkan koordinasi terstruktur antara arsiparis madya yang bertugas langsung di lapangan, kepala bidang yang bertindak sebagai pengawas, serta kepala dinas yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Model koordinasi ini mencerminkan distribusi kekuasaan yang jelas sehingga masing-masing pihak memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling mendukung dalam pelaksanaan digitalisasi arsip. Salah satu contoh nyata dari pengambilan keputusan adalah proses autentikasi arsip digital melalui pemberian watermark, yang menjadi langkah strategis untuk melindungi hak cipta serta menjamin keaslian arsip sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah.

Selain peran pegawai, berbicara Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pengelolaan Arsip juga perlu dirasakan langsung oleh masyarakat. Peneliti juga memperoleh dokumen berupa rekapitulasi hasil data mengenai permintaan masyarakat yang membutuhkan arsip di Dispusipda Jabar khususnya Bidang PAS berdasarkan tahun 2025 :

Tabel Rekapitulasi Kunjungan ke ruang preservasi atau depot arsip bulan januari – juni tahun 2025

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Jumlah
404	296	38	4	119	148	1.0009

Sumber : Dispusipda dan diolah peneliti 2025

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi dan sosialisasi yang perlu diperbaiki agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses arsip digital tanpa hambatan. Dengan demikian, dinamika kekuasaan yang terkelola dengan baik bukan hanya mendukung pelaksanaan teknis, tetapi juga memperhatikan aspek komunikasi dan partisipasi publik guna memperkuat keberhasilan digitalisasi arsip statis.

KAPASITAS PELAKSANA

Kapasitas Pelaksana menjelaskan bahwa kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien. Aspek ini meliputi peningkatan kompetensi dan profesionalisme agar pelaksana dapat menjalankan tugas sesuai tujuan kebijakan, menjadi kunci keberhasilan transformasi digital melalui SDM yang kompeten, fasilitas memadai, dan koordinasi yang baik.

Kapasitas Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pengelolaan Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tergolong cukup memadai. Hal ini terlihat dari kompetensi dan profesionalisme arsiparis yang terus ditingkatkan melalui pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh lembaga seperti ANRI dan BPSDM. Walaupun masih ditemukan kendala teknis, terutama pada peralatan seperti scanner yang membutuhkan upgrade, dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia tenaga IT, serta Inisiatif pengembangan aplikasi SIDIK sebagai upaya integrasi digitalisasi arsip, menunjukkan komitmen dalam memperkuat kapasitas pelaksana. Selain itu, interaksi pegawai dengan masyarakat yang ramah dan profesional bahkan menjadi faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi arsip statis.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Aspek ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan responsif dan transparan, sesuai kebutuhan penerima manfaat. Dengan partisipasi yang baik, proses implementasi menjadi lebih efektif karena didukung oleh masukan dan pengawasan dari masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat kebijakan.

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pengelolaan Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya upaya pelibatan berbagai pihak, baik institusi internal maupun eksternal. Inovasi seperti program

PHUSAKA di Bidang PAS menawarkan ruang bagi masyarakat, khususnya pemilik arsip korporasi dan keluarga, untuk memperoleh layanan perbaikan dan digitalisasi arsip yang lebih inklusif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan melalui program Magang dan PKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau pelajar untuk terlibat langsung dalam proses digitalisasi arsip, sehingga peran masyarakat dalam mendukung kebijakan ini semakin nyata. Selain itu peneliti juga memperoleh dokumen berupa rekapitulasi hasil data mengenai Restorasi Arsip Layanan PHUSAKA (Perbaikan Khusus Arsip Korporasi dan Keluarga) di Dispusipda Jabar khususnya Bidang PAS berdasarkan tahun terbaru :

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Layanan PHUSAKA Bulan Januari – Juli Tahun 2025

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
63	84	122	82	790	1335	2.487

Sumber : Dispusipda dan diolah peneliti 2025

Berdasarkan Tabel diatas Rekapitulasi restorasi arsip layanan PHUSAKA telah melaksanakan kegiatan perbaikan dan mendigitalisasi arsip khususnya di bidang PAS dengan Jumlah 2.487 arsip atau dokumen. Disamping itu peneliti juga memperoleh dokumen mengenai rekapitulasi statistik layanan terkait SIKN JIKN di Dinas Perputakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Statistik Layanan Kearsipan Tahun 2025

No.	Kegiatan	Tahun 2025					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Penyusunan Daftar Informasi	544	1.020	635	849	885	529
2.	Entry/ Unggah SIKN JIKN	319	1.359	575	1436	447	243

Sumber : Dispusipda dan diolah peneliti 2025

Rekapitulasi statistik layanan kearsipan di Dispusipda Jabar telah melakukan pengadaan atau penginputan data kearsipan yang dilayankan kepada masyarakat melalui SIKN JIKN dengan jumlah sekitar 17.448 Arsip yang tersedia. Namun, berdasarkan hasil penelitian dengan berbagai informan dari pegawai maupun masyarakat tidak dapat memberikan feedback atau masukan dikarenakan SIKN JIKN merupakan sistem mandatory dibawah naungan KOMINFO dan akses layanan yang terkadang terhambat. Oleh karena itu, meskipun terdapat berbagai inovasi dan kolaborasi yang dapat

mendorong keterlibatan masyarakat, diperlukan penguatan dalam menyediakan mekanisme komunikasi yang jelas dan perbaikan sistem akses agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal dan pelayanan digital semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna.

ADAPTASI DAN INOVASI

Adaptasi dan inovasi adalah kemampuan institusi dan pelaksana kebijakan untuk menanggapi perubahan dengan mengembangkan solusi baru atau memperbaiki proses. Aspek ini menekankan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lingkungan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan agar digitalisasi arsip statis berjalan efektif dan berkelanjutan.

Adaptasi dan Inovasi dalam implementasi kebijakan digitalisasi pengelolaan arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat tergolong cukup baik. Hal itu ditandai dari bidang PAS yang memiliki Program PHUSAKA, para arsiparis dituntut untuk dapat melakukan restorasi arsip dan digitalisasi arsip, hal itu mendapatkan apresiasi penilaian kemendagri atas PHUSAKA dengan indeks inovasi daerah diatas 90%. Selain itu untuk arsip statis belum ada inovasi teknologi melalui aplikasi, mereka saat ini lebih kepada alih media saja menggunakan scanner biasa, dan tidak menggunakan aplikasi khusus, jikalau pun dirancang, maka akan terjadi tumpang tindih dengan SIKN JIKN.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai pelaksanaan kebijakan, memastikan kesesuaian dengan rencana, dan mencapai tujuan. Aspek ini mengukur efektivitas, dampak, serta penerimaan kebijakan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan kebutuhan perbaikan guna mendukung kelancaran implementasi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Pemantauan dan evaluasi dalam implementasi digitalisasi pengelolaan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat berjalan sistematis dengan target jelas, seperti pencapaian minimal 3.500 arsip digital per tahun sebagai indikator kinerja dan penilaian tunjangan pelaksana. Rapat koordinasi rutin membantu memantau progres, mengevaluasi kendala, dan memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota, yang tercermin dari prestasi tiga kabupaten terbaik dalam digitalisasi arsip. Dukungan dari Arsip Nasional dengan sekitar 18.800 arsip digital menandakan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Meski begitu, evaluasi terus diperlukan, terutama untuk perbaikan sarana prasarana agar proses digitalisasi lebih optimal. Masukan masyarakat juga menyoroti perlunya peningkatan sistem dan sosialisasi tata cara akses arsip digital agar lebih mudah digunakan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi tidak hanya fokus pada kuantitas pencapaian, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat demi keberlanjutan kebijakan digitalisasi arsip.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pengelolaan Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini pada dasarnya telah berjalan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari aspek struktur institusional yang sudah terorganisir sesuai regulasi, dinamika kekuasaan yang menunjukkan koordinasi jelas antarpegawai, kapasitas pelaksana yang didukung sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat melalui program PHUSAKA dan keterlibatan pelajar dalam digitalisasi menuju SIKN-JIKN. Inovasi yang dihasilkan pun mendapatkan apresiasi tinggi, sementara pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan target terukur setiap tahunnya. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga ahli IT, pemangkasan anggaran, sarana prasarana yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan digital, serta kendala teknis pada sistem SIKN-JIKN. Untuk mengatasinya, diperlukan perekrutan atau kerja sama dengan tenaga ahli, komitmen penuh dari seluruh arsiparis, pembaruan alat dan server, penguatan akses layanan kearsipan elektronik hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pemeliharaan server yang lebih optimal oleh KOMINFO agar akses arsip digital dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. (2023). The impact of the control function on the effectiveness of policy implementation. *Journal of Public Affairs*, 23(4), 1–10. <https://doi.org/10.1002/pa.2875>
- Bawono, H. (2020). Risk Detection in Digital Information Management: A Records Management Perspective. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 8(2), 251–267. <https://doi.org/10.24252/kah.v8cf3>
- Janah, E. U., Hidayah, P. F., Adysti, R. N., Arjuna, R. H., & Surabaya, U. N. (2024). *Of a h.* 5, 474–484.
- Esposito, J., & Evans-Winters, V. (2022). Introduction to inter-sectional qualitative research. SAGE
- Lahman, M. K. E. (2024). An introduction to qualitative research: Becoming culturally responsive. SAGE Publications.
- Marshall, B. H. . (2018). *The complete guide to personal digital archiving*. ALA Editions, an imprint of the American Library Association.
- Pranata, M. R. (2024). Arsip Digital Untuk Efisiensi Pengelolaan Dan Percepatan Pelayanan. *SIGNIFICANT : Journal Of Research And Multidisciplinary*, 3(01), 162–172. <https://doi.org/10.62668/significant.v3i01.891>
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi

Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E- Government. *Jurnal Fasilkom*, 12(1), 14–19.
<https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512>

Sudarsana, F. B. H., Suryana, S., & Saprialman. (2024). Analisis digitalisasi arsip di dinas arsip dan perpustakaan kabupaten karawang. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6547–6552.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta